



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kecamatan Sungai Tabuk

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024 ini adalah merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah unsur dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2021 - 2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Sungai Tabuk sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.



Sungai Tabuk, Januari 2025
Camat Sungai Tabuk,

H. TAUFIQURRAHMAN, SH, M.Si
NIP. 196708131994041001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar 2021 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2024 telah berhasil dicapai.

Sasaran Strategis Kecamatan Sungai Tabuk adalah ***Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan*** dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan. merupakan Pengukuran kinerja kecamatan terhadap tingkat kreativitas perangkat daerah kecamatan Sungai Tabuk dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya

Analisa terhadap sasaran strategis Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori **Sangat Baik/ sangat Tinggi** dengan capaian kinerja **92,29 atau (121,43%)**.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Sungai Tabuk berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Sungai Tabuk adalah seperti

dijelaskan pada tabel di bawah ini.

SumberDana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBD	Rp. 6.057.917.961,-	100%

Laporan Realiasi Anggaran Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
BELANJA DAERAH	6.057.917.961,00	5.637.912.949,00	93,07	3.512.158.649,00
BELANJA OPERASI	5.579.234.151,00	5.165.578.139,00	92,59	3.188.524.211,00
Belanja Pegawai	2.812.186.741,00	2.625.929.373,00	93,38	2.226.142.625,00
Belanja Barang dan Jasa	2.767.047.410,00	2.539.648.766,00	91,78	962.381.586,00
BELANJA MODAL	478.683.810,00	472.334.810,00	99,07	323.634.438,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	317.476.100,00	311.127.100,00	98,00	101.354.438,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.350.710,00	6.350.710,00	100,00	71.530.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	154.857.000,00	154.857.000,00	100,00	150.750.000,00
SURPLUS / DEFISIT	(6.057.917.961,00)	(5.636.975.185,00)	0	(3.512.158.649,00)
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(6.057.917.961,00)	(5.636.975.185,00)	0	(3.512.158.649,00)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aplikasi Langkar Tahun 2024

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Maksud dan Tujuan	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	2
C. Isu Strategis.....	7
D. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Tujuan Strategis	11
B. Indikator Kinerja Utama	11
C. Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Tujuan Strategis	26
B. Capaian Kinerja Organisasi	26
B. Realisasi Anggaran	77
BAB IV PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-Saran	103
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Profil Sumber Daya Manusia Tahun 2024
Tabel 1.2	Tabel Permasalahan pada Kecamatan Sungai Tabuk
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja
Tabel 3.2	Realisasi Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi/ Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Periode Akhir Renstra
Tabel 3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tabel 3.6	Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja
Tabel 3.7	Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran untuk Mewujudkan Sasaran Kinerja Organisasi

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Sungai Tabuk
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Sungai Tabuk
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Sungai Tabuk kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Sungai Tabuk
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Sungai Tabuk
4. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
5. Sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran pada tahun mendatang

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

B.1 TUGAS:

Kecamatan Sungai Tabuk merupakan unsur Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

B.2 FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;

- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan

B.3 DASAR HUKUM :

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri/ Permen KL terkait dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Tabuk
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 Tanggal 1 Oktober 2024 Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022

Nomor 42);

10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 51);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 25)
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

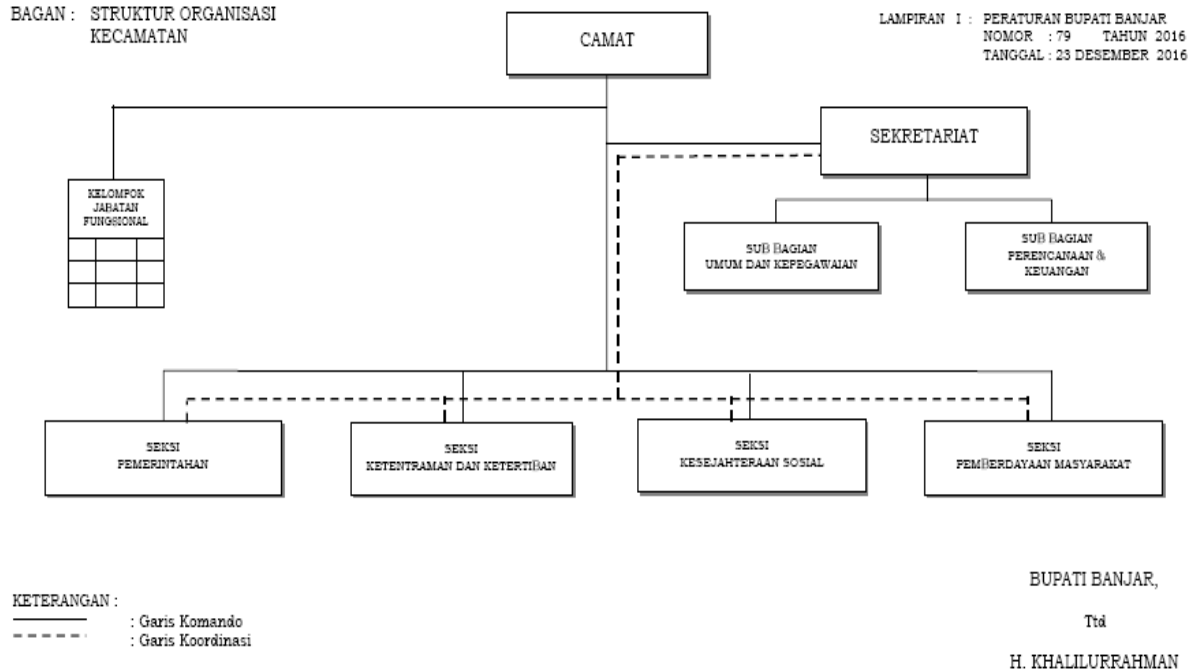
B.4 STRUKTUR ORGANISASI :

Susunan Organisasi Kecamatan Sungai Tabuk terdiri dari:

Susunan organisasi Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan Keuangan dan Aset
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



Gambar 1.1. Bagan SOTK Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar

B.5 KEPEGAWAIAN :

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar masih belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pemberdayaan secara prosedural, tentunya untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat yang berkualitas.

Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Sungai Tabuk.

**Tabel 1.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Sungai Tabuk
Kabupaten Banjar Tahun 2024**

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						Jml
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Camat			1		1				1						1
2	Sekretaris			1		1				1						1
3	Kepala Seksi Pemerintahan				1		1				1					1
4	Kepala Seksi Pemeberdayaan Masyarakat				1		1				1					1
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial				1		1				1					1
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban				1		1				1					1
7	Kasubag Perencanaan Keuangan & Aset				1		1					1				1
8	Kasubag Umpeg				1		1			1						1
9	Pelaksana							5					5			5
10	PPPK						1				1					1
11	Tenaga Honor/Kontrak										3		4		1	8
	Jumlah			2	6	2	7	5		3	8	1	9		1	22

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sungai Tabuk

C. ISU STRATEGIS

Kecamatan Sungai Tabuk secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Sungai Tabuk sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok Pelayanan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya diltampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*Unresolved Matters*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Sungai Tabuk adalah Pelaksanaan Pelayanan Paten masih belum maksimal.

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Sungai Tabuk yang membantu Kepala Daerah dalam Urusan Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra Perubahan dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar

masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kecamatan Sungai Tabuk masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Tabel Permasalahan pada Kecamatan Sungai Tabuk

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan belum optimal	Pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan belum optimal
			Meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum belum optimal	Pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan belum optimal
			Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan belum optimal	Pengelolaan atas Trantibumlinmas di Kecamatan belum optimal
			Pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan belum optimal
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan belum optimal	Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan peraturan perundangan belum optimal

			Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan
--	--	--	---

Sumber : Dokumen Perubahan Kedua Renstra Kec.Sungai Tabuk Tahun.2021-2026

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

KATA PENGANTAR;

DAFTAR ISI;

RINGKASAN EKSEKUTIF;

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2024 dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 beserta analisisnya

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun subkegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu: "Teselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik".

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan definisi operasional sebagai berikut: Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara. Formulasinya adalah $(\text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \text{total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}$. (Rujukan: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat)

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya

apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Sungai Tabuk mengampu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Kecamatan Sungai Tabuk mendukung pencapaian misi keempat Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah”

Tujuan

Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik

- Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

- Indikator : Nilai Evaluasi Kecamatan

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.

Adapun faktor yang mendukung terlaksananya IKU antara lain :

1. Tersedianya anggaran yang dipergunakan pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU

Sedangkan faktor penghambat IKU yaitu :

1. Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) di lakukan akhir tahun oleh Tim Penilai EKK Tingkat Kecamatan

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar No. 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	<p>(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang</p> <p>Aspek yang dinilai meliputi: Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Rencana Range Nilai: 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik / Sangat Tinggi)</p>	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

Sumber : Surat Keputusan IKU Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (top-down) dan ke samping (horizontal-diagonal) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Perencanaan kinerja Kecamatan Sungai Tabuk adalah rencana kinerja yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Tabel dibawah ini menyajikan sasaran strategis dan sasaran Kinerja Kecamatan Sungai Tabuk dengan program kegiatan serta alokasi anggaran yang dikelola Pemerintah Kecamatan Sungai Tabuk pada Tahun 2024.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. 75 (Rencana Range Nilai 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100	76	Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.694.638.971	Camat
						Program Penyelenggaraan pemerintahan Dan Pelayanan Publik	22.550.000	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	65.405.000	
						Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	35.431.000	
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1.358.595.000	
						Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.755.790	

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(Sangat Baik/Sangat Tinggi)					
2	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	Jumlah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi dibagi dengan jumlah penunjang urusan pemerintah daerah keseluruhan dikali 100%	76	Indeks	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.694.638.971	Sekretaris Camat
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evalausi SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang telah disusun: Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi yang harus	100	Persen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.160.000	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah meliputi: RENSTRA, Rencana Aksi, Tabel Keselarasan, Rencana Aksi Perubahan, Tabel Keselarasan Perubahan, RKA Murni, RKA Perubahan, DPA Murni, DPA Perubahan, LKJIP, PK Murni, PK Perubahan, IKU	13	Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.910.000	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi meliputi: Laporan Triwulan, Laporan RFK, Laporan RENJA, e-monev SAKIP Triwulan	21	Laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.250.000	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset
6	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan: jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%	100	Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.796.186.741	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan: Jumlah Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%	100	Persen	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.350.000	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Aset
8	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Kepegawaian di Kecamatan yang terlaksana: jumlah Administrasi Kepegawaian di Kecamatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.500.000	Kasubag Umum Kepegawaian
9	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja yang meliputi SKP	1	Dokumen	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.500.000	Kasubag Umum Kepegawaian
10	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang meningkat Wawasan & kompetensinya	3	Orang	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	Kasubag Umum Kepegawaian

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.793.712	Kasubag Umum Kepegawaian
12	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia di Kecamatan	4	Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.789.000	Kasubag Umum Kepegawaian
13	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersediannya Kecamatan	4	Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.495.212	Kasubag Umum Kepegawaian
14	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah bahan logistik yang tersedia di kecamatan	4	Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.909.500	Kasubag Umum Kepegawaian
15	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah barang cetak dan pengadaan yang tersedia di kecamatan	1	Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.600.000	Kasubag Umum Kepegawaian
16	Terselenggaranya kegiatan kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	1	Laporan	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	Kasubag Umum Kepegawaian

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana	12	Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000	Kasubag Umum Kepegawaian
18	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang terlaksana: Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang direncanakan x 100%	100	Persen	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	334.872.400	Kasubag Umum Kepegawaian
19	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia: Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang direncanakan x 100%	100	Persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.019.008	Kasubag Umum Kepegawaian
20	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang terpelihara: jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang direncanakan x 100%	100	Persen	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.757.110	Kasubag Umum Kepegawaian

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan: Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.050.000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
22	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah Laporan Pelayanan Paten yang sesuai SOP	5	Laporan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.050.000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
23	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana	Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana	100	Persen	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.500.000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
24	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	Laporan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.500.000	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dan Kebencanaan Kecamatan					
25	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan (Keg PKK, Musrenbang Kec, dan Keg Pemberdayaan Masyarakat Lainnya sesuai dengan kondisi masing-masing Kec)	100	Persen	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65.405.000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
26	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan : jumlah Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan dikali 100%	100	Persen	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	857.542.200	Lurah Sungai lulut
27	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana: Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang direncanakan x 100%	1	Pokmas	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Lulut	857.542.200	Lurah Sungai lulut

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Terlaksananya Kegiatan Trantibumlinmas di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	jumlah penyelenggaraan trantibum yang terlaksana: jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.681.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
29	Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	jumlah penyelenggaraan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah yang terlaksana: jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.750.000	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
30	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan: Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100%	100	Persen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.358.595.000	Kepala Seksi Pemerintahan

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang di laksanakan	200	Orang	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	49.995.000	Kepala Seksi Pemerintahan
32	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Dilaksanakan	3	Dokumen	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.275.000.000	Kepala Seksi Pemerintahan
33	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan	1	Dokumen	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.600.000	Kepala Seksi Pemerintahan

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	100	Persen	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.755.790	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
35	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang Terfasilitasi	1	Dokumen	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
36	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang Terfasilitasi	1	Dokumen	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
37	Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Terfasilitasi	1	Dokumen	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.755.790	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
38	Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa/Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta penetapan dan Penegasan Batas Desa yang Terfasilitasi	1	Dokumen	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.000.000	Kepala Seksi Pemerintahan Desa

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Sungai Tabuk

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berupa data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan yang mengacu pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat.

Berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, telah dilakukan telaah terhadap misi, tujuan, sasaran strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjar. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sungai Tabuk mendukung sasaran dalam hal "Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik". Realisasi tujuan dan sasaran strategis tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran
				2024	2024
1	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		86	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		Nilai Evaluasi Kecamatan	76	92,29

Sumber data : RPJMD Kabupaten Banjar 2021 – 2026, Kecamatan Sungai Tabuk 2024

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100\%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100\%$$

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Sungai Tabuk Kab. Banjar tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.2 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	Hijau
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	Biru
4	51% ≤ 65%	Rendah	Kuning
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76	Nilai	92,29	121,43	Sangat Tinggi
2	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	76	Indeks	79,46	104,55	Sangat Tinggi
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evalausi SKPD	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
4	Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	13	100	Sangat Tinggi
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Laporan	21	100	Sangat Tinggi
6	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
8	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
9	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1	100	Sangat Tinggi
10	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3	Orang	3	100	Sangat Tinggi
11	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
12	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	100	Sangat Tinggi
14	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	4	100	Sangat Tinggi
15	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	100	Sangat Tinggi
16	Terselenggaranya kegiatan kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	1	100	Sangat Tinggi
17	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	100	Sangat Tinggi
18	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
19	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
21	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
22	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	5	100	Sangat Tinggi
23	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
24	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Laporan	1	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
26	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Presentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
27	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1	Pokmas	1	100	Sangat Tinggi
28	Terlaksananya Kegiatan Trantibumlinmas di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
29	Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi
30	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200	Orang	200	100	Sangat Tinggi
32	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3	Dokumen	3	100	Sangat Tinggi
33	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	1	100	Sangat Tinggi
34	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	100	100	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	1	100	Sangat Tinggi
36	Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	1	100	Sangat Tinggi
37	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	1	100	Sangat Tinggi
38	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan DesaKepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	1	100	Sangat Tinggi

Penjelasan Tabel 3.2 sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja Utama Kecamatan Sungai Tabuk adalah **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**, dengan Indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Evaluasi Kinerja Kecamatan adalah instrumen penilaian yang dijadikan patokan untuk pengukuran kinerja kecamatan. Kinerja Kecamatan adalah tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya dengan formulasi perhitungan :

(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang

Perhitungan :

$$\frac{92,29}{76} \times 100\% = 121,43 \%$$

Evaluasi Kinerja Kecamatan diselenggarakan oleh Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Terdapat 6 (enam) Aspek yang menjadi fokus penilaian EKK, yaitu :

- Aspek Administrasi
- Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- Aspek Pelayanan Publik
- Aspek Kesejahteraan Sosial
- Aspek Ketentraman dan Ketertiban
- Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan
- Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Evaluasi Kinerja Kecamatan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dimulai pada semester ke-2 (dua) tahun berjalan, Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan Sungai Tabuk pada Tahun 2024 dengan Target 76 Nilai realisasi 92,29 dengan nilai capaian 121,43%, dengan predikat capaian **Berhasil**.

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan sasaran strategis/IKU ini adalah terjalinnya kerjasama, koordinasi serta sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah dengan masyarakat dan stakeholder lainnya.

Sedangkan Faktor yang menjadi penghambat keberhasilan adalah Kuantitas dan Kualitas SDM aparatur serta ketersediaan sarana dan prasarana

Kendala kuantitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur berkaitan dengan jumlah dan tingkat keterampilan serta kompetensi dari pegawai atau aparatur yang ada di kecamatan Sungai Tabuk, Masalah kuantitas SDM karena jumlah pegawai tidak yang memadai untuk menangani tugas dan tanggung jawab yang ada. Kurangnya kuantitas aparatur dapat mengakibatkan beban kerja yang berlebihan bagi pegawai yang ada, yang pada gilirannya dapat mengurangi produktivitas dan kinerja. Ini juga berpotensi akan menyebabkan penundaan dalam pelayanan publik atau penurunan kualitas layanan karena tidak cukupnya tenaga untuk menangani permintaan atau pekerjaan yang ada.

Sementara itu Kendala kualitas SDM karena keterampilan, pengetahuan, atau kemampuan yang dimiliki aparatur masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Salah satunya karena kurangnya pelatihan yang memadai. Sehingga berpotensi menyebabkan Ketidakmampuan memenuhi standar kualitas yg mengakibatkan menurunnya kinerja dan penurunan kepercayaan publik.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala SDM, pemerintah Kecamatan Sungai Tabuk mengusulkan pelatihan dan pengembangan aparatur, melakukan perbaikan manajemen kinerja yang baik, dan pembangunan budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja.

Selain kendala SDM, ketersediaan sarana prasarana juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik sangat penting karena berbagai alasan:

- 1. Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan:** Sarana dan prasarana yang memadai membantu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini mencakup fasilitas fisik seperti gedung, kendaraan, peralatan, dan teknologi informasi yang mendukung proses pelayanan.
- 2. Efisiensi Operasional:** Sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan efisiensi operasional kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan lebih baik, cepat, tepat, dan efisien.
- 3. Keterjangkauan:** Peningkatan sarana dan prasarana dapat membantu meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang.
- 4. Kepuasan Masyarakat:** Sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Fasilitas yang nyaman dan mudah diakses dapat menciptakan pengalaman positif bagi pengguna layanan.
- 5. Peningkatan Produktivitas:** Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan produktivitas kerja akan meningkat

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi Catatan penting dalam pencapaian sasaran yang menjadi fokus ditahun mendatang yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur
2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja sasaran antara lain :

1. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas agar program kegiatan dapat berjalan dengan baik
2. Mengoptimalkan sistem pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak awal
3. Mengoptimalkan sistem pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar
5. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat
6. Kemajuan dan keterbukaan teknologi dan informasi publik

Upaya perbaikan :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui kegiatan peningkatan wawasan, studi banding, studi tiru maupun pelatihan-pelatihan dalam rangka menambah wawasan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Melakukan monitoring dan Evaluasi secara rutin dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditargetkan.
3. Melakukan analisis atas penyebab ketidaksesuaian antara target dan realisasi, serta penentuan langkah perbaikan yang diperlukan.

Sasaran Kinerja Program :

Pencapaian kinerja sasaran strategis didukung oleh 6 (enam) Program yang saling bersinergi dalam pencapaian indikator utama antara lain :

2. Sasaran Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Indikator kinerja sasaran adalah Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI). Penilaian IKKI dilakukan oleh Inspektorat selaku APIP Daerah. Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja intern Perangkat Daerah tersebut meliputi unsur Kinerja Utama, Kepatuhan dan Kinerja Pelayanan Publik dengan formulasi perhitungan :

$$\sum (Unsur\ kinerja\ utama\ x\ 40\%) + (Unsur\ kepatuhan\ x\ 30\%) + (Unsur\ Pelayanan\ Umum\ x\ 30\%)$$

$$\frac{79,46}{76} \times 100\% = 104,55\%$$

Unsur yang dinilai antara lain meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja, Unsur kepatuhan, tata laksana dan tata Kelola pengadaan barang dan jasa, SPIP, Keandalan Laporan Keuangan, Pengelolaan aset dan pengamanan aset serta manajemen ASN, Pelayanan Publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), adanya inovasi dan keterbukaan informasi dan layanan pengaduan.

Penilaian IKKI dilaksanakan pada Semester 2 di akhir tahun. Hasil Capaian IKKI Kecamatan Sungai Tabuk dari Target 76 indeks dengan capaian realisasi 79,46 indeks.

Kinerja Indikator IKKI ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan yaitu 1) kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah; 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah; 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; 4) Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah; 5) kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah; 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah; dan 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor yang menjadi pendorong capaian kinerja yaitu : Kerjasama internal dan unit kerja lainnya, teknologi yang semakin maju dan adanya target capaian yang harus dipenuhi Sedangkan kendala yang dihadapi adalah tidak adanya inovasi pada Kecamatan Sungai Tabuk dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

3. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Kinerja Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD yang terselenggara, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang disusun meliputi : RKA, DPA, RKAP, DPPA, IKU, Rencana Aksi, Rencana Aksi Perubahan, Tabel Keselarasan, Renja, Renja Perubahan, PK, PK Perubahan

Sasaran kinerja tercapai 100 persen dengan formulasi perhitungan Jumlag Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang disusun dibagi Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi yang direncanakan di kali 100%

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang disusun}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Yang menjadi faktor pendukung yaitu Tersedianya dokumen perencanaan sesuai jadwal, Koordinasi yang mudah dan nyaman dengan Mitra di Bappeda, BPKPAD, Bagian Organisasi, Inspektorat dan berusaha untuk menyelesaikan laporan sesuai permintaan/sesuai target. Adapun faktor penghambat yang menjadi kendala yaitu : Sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan Program/ Kegiatan dalam dokumen perencanaan masih belum sepenuhnya selaras, Terlalu lemahnya informasi dari Bidang pelaksana kegiatan/ lambat apabila diminta data maupun informasi serta sumber daya perencana yang masih terbatas.

Keberhasilan sasaran Kinerja Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung 2 sub kegiatan antara lain :

4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Penyusunan dokumen perencanaan dengan target 13 dokumen terealisasi sesuai target yaitu 13 dokumen perencanaan. Dokumen tersebut antara lain IKU, Rencana Aksi, Rencana Aksi Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Renja, Renja Perubahan, Tabel Keselarasan

5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja dengan target 20 laporan terealisasi sesuai target yaitu 20 laporan meliputi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan E Sakip Simondalev secara triwulanan, Laporan Kinerja Triwulan dan LKjIP.

6. Sasaran Kinerja Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas

Sasaran Kinerja Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana}}{\text{Target Administrasi Keuangan Perangkat Daerah}} \times 100\%$$
$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Kegiatan yang di laksanakan pada sasaran kinerja Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas antara lain :

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 21 orang/ bulan dan terealisasi sebanyak 273 orang selama 1 tahun
- Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan dengan target 12 dokumen terealisasi 12 dokumen
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan target 1 laporan terealisasi 1 Laporan Keuangan Akhir Tahun

Adapun yang menjadi faktor pendukung tercapainya yaitu adanya bimbingan dan koordinasi yang baik dengan BPKPAD. Sedangkan yang sering menjadi kendala adalah seringnya gangguan pada Aplikasi, antara Aplikasi SIPD RI dan SIPD Langkar terdapat selisih, Kurang kompetennya SDM yang ada di bagian keuangan Kecamatan Sungai Tabuk.

7. Sasaran Kinerja Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas

Sasaran Kinerja Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang direncanakan}} \times 100\%$$
$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran kinerja Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas antara lain :

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD terealisasi sebanyak 1 paket
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD terealisasi sebanyak 1 laporan

8. Sasaran Kinerja Lancarnya administrasi kepegawaian daerah

Sasaran Kinerja Lancarnya administrasi kepegawaian daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Administrasi Kepegawaian di Kecamatan yang terlaksana}}{\text{jumlah Administrasi Kepegawaian di Kecamatan yang direncanakan}} \times 100\%$$
$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran kinerja Lancarnya administrasi kepegawaian daerah antara lain :

9. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai terealisasi sebanyak 1 dokumen
10. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebanyak 3 orang
11. Sasaran Kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor

Sasaran Kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan yang direncanakan}} \times 100\%$$
$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada sasaran kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor antara lain :

12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sebanyak 4 (empat) paket. Adanya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ini mendukung pelayanan administrasi perkantoran. Dengan adanya komponen instalasi listrik yang lengkap, pelayanan perkantoran dapat berjalan dengan baik
13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga berupa alat alat kebersihan dan sarana lainnya sebanyak 4 paket. Dengan tersedianya peralatan dan perlengkapan rumah tangga akan menunjang kelancaran pekerjaan kantor.
14. Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa alat tulis kantor sebanyak 4 paket. Dengan tersedianya bahan logistik akan menunjang kelancaran pekerjaan kantor.
15. Penyediaan cetak dan penggandaan 1 paket sesuai target Penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah untuk memenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sebagai penunjang kelancaran kegiatan administrasi perkantoran. Barang cetakan yang dihasilkan dari penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah Map kop Kecamatan, spanduk dan lain-lain
16. Fasilitas kunjungan tamu sebanyak 1 laporan sesuai target. Fasilitas ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi atau menyambut tamu-tamu yang berkunjung ke Kecamatan Sungai Tabuk. Tamu-tamu yang berkunjung bukan hanya dari dinas atau instansi terkait tetapi ada beberapa kali kunjungan Universitas Sari Mulia dan kunjungan dari Kecamatan Banjarbaru Selatan
17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan sesuai target. Undangan yang harus dihadiri diantaranya Rapat Koordinasi undangan sosialisasi dan kegiatan rapat lainnya di Kabupaten ataupun Provinsi dan Luar Daerah.

Tercapainya keberhasilan dipengaruhi beberapa faktor pendukung yaitu: Koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal yang baik dan beberapa faktor penghambat yaitu : Kurangnya SDM di Kecamatan Sungai Tabuk, Undangan rapat yang berbenturan dengan rapat lainnya, Jumlah kedatangan tamu yang

tidak bisa di prediksi kedatangannya, harga standar satuan di DPA terlalu tinggi.

18. Sasaran Kinerja Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan

Sasaran Kinerja Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan dengan indikator Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang terlaksana}}{\text{Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang direncanakan}} \times 100\%$$
$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Aktifitas yang mensupport keberhasilan capaian sasaran yaitu pengadaan peralatan dan mesin sebanyak 287 unit untuk memenuhi tersedianya sarana prasarana sesuai kebutuhan

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan adalah beberapa pengadaan di Kecamatan Sungai Tabuk sudah melalui proses e purchasing, Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah sarana dan prasarana yang terbatas.

19. Sasaran Kinerja Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor

Sasaran Kinerja Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia}}{\text{Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang direncanakan}} \times 100\%$$
$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Aktifitas yang mensupport keberhasilan capaian sasaran yaitu Penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 12 laporan, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dari target 12 laporan terlaksana seluruhnya serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dari target 12 laporan terlaksana seluruhnya

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor adalah Kerjasama internal dan eksternal yang baik dan Tersedianya anggaran yang mencukupi dalam penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu kurangnya SDM Kecamatan Sungai Tabuk

20. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan

Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan dengan indikator Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan kriteria Capaian Sangat Tinggi.

Formulasi Perhitungan:

$$\frac{\begin{array}{c} \text{jumlah pemeliharaan BMD} \\ \text{penunjang urusan perangkat} \\ \text{daerah yang terpelihara} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{jumlah pemeliharaan BMD} \\ \text{penunjang urusan perangkat daerah} \\ \text{yang direncanakan} \end{array}} \times 100\%$$
$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Aktifitas yang mensupport keberhasilan capaian sasaran yaitu Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam rangka menunjang operasional kantor, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pemeliharaan AC, komputer, printer sehingga perlatan dan mesin kantor dapat terpelihara dan berfungsi dengan baik guna menunjang aktifitas perkantoran, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah tersedianya anggaran untuk jasa pemeliharaan/ pajak dan perizinan kendaraan, Pembayaran paja tepat waktu. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah minimnya dana pemeliharaan mobil dinas operasional karena membutuhkan banyak penggantian sparepart/ suku cadang.

21. Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

Indikator kinerja Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana dengan target 100%. Secara fisik sasaran sudah tercapai seluruhnya sesuai target yang

ditetapkan. Sasaran tercapai 100 persen yang diperoleh dari formulasi perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

22. Sasaran kinerja program didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan melalui sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan aktifitas sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kerja SOP dan SKM atas pelayanan pada Seksi Kesejahteraan sosial
- Melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan
- Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial
- Inventarisasi dan pengolahan data keluarga fakir miskin, penyandang cacat, lanjut usia, anak terlantar, panti asuhan dan korban bencana
- Inventarisasi dan pengolahan data organisasi sosial kemasyarakatan organisasi karang taruna, keluarga pahlawan perintis kemerdekaan dan veteran
- Melaksanakan fasilitasi kelancaran pemberian/penyaluran dan bantuan sosial kepada fakir miskin, lanjut usia, disabilitas, panti asuhan dna korban bencana
- Melaksanakan pelayanan pelegalisasian salinan (copy) Surat Keterangan Nikah
- Pelaporan kejadian bencana alam

- Melaksanakan kegiatan Kecamatan Sehat
- Melaksanakan kegiatan rembuk stunting
- Rapat PKH

Adapun yang menjadi faktor pendukung pada sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yaitu : Koordinasi yang baik dengan Masyarakat, Pembakal dan Kelurahan serta internal Kecamatan dan Dinas SKPD terkait. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya yaitu : Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hadir ke Posyandu serta rendahnya kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Stunting pada anak.

23. Sasaran Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan indikator kinerja Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana dengan target 100%. Secara fisik sasaran sudah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan. Sasaran tercapai 100 persen yang diperoleh dari formulasi perhitungan yaitu Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

24. Sasaran kinerja program didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan melalui sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan aktifitas sebagai berikut :

- Rapat Koordinasi TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)
- Fasilitasi bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana

Yang menjadi faktor pendukung pada sasaran Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat antara lain Koordinasi yang baik antara Pemerintahan Desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, serta Dukungan dari Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan Kesejahteraan Sosial. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu : Rendahnya Pemahaman masyarakat tentang masalah sosial, terutama kurangnya kesadaran masyarakat tentang kriteria penerima bantuan sosial, Belum pernah dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah berhasil menyelenggarakan pelimpahan wewenang

25. Sasaran Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan sesuai dengan ketentuan

Sasaran meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan target kinerja 100%. Secara fisik sasaran kinerja sudah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan Definisi Operasional yaitu Menunjukkan jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan (Keg PKK, Musrenbang Kecamatan, dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan}}{\text{jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

a. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan target 21 lembaga kemasyarakatan. Target sub kegiatan sudah tercapai sel uruhnya di Triwulan I Tahun 2024. Aktifitas yang sudah dilaksanakan yaitu kegiatan pra musrenbang dan Musrenbang tingkat kecamatan

b. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Laporan pelaksanaan Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target 3 Laporan. Aktivitas yang dilaksanakan antara lain Monitoring dan pengawasan dana desa, pembinaan pengelolaan ADD, Evaluasi APDES, Kegiatan PKK dan Sosialisasi BUMDES.

Adapun yang menjadi faktor pendukung Koordinasi dan Kerja sama yang baik dengan Jajaran samping/Instansi terkait, Motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu : Partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang masih kurang, Acara Kegiatan di Desa sering berbenturan jadwal dengan kegiatan yang ada diKecamatan, Kegiatan PKK menyita waktu PTT Kecamatan karena kurangnya kader di Kecamatan.

26. Sasaran Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Sasaran Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator kinerja Presentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target kinerja 100%. Secara fisik sasaran kinerja sudah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan Definisi Operasional yaitu Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana

$$\frac{\text{Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang di laksanakan}}{\text{Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan direncanakan}} \times 100\%$$
$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

27. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Lulut

Aktivitas yang dilaksanakan antara lain : Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat (Sosialisasi Stunting), Pelatihan Kegiatan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pelatihan Administrasi PKK, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lansia, Koordinasi RT, Musrenbang Kelurahan, Kegiatan Isra Mi'raj dan Jalan Pemukiman berupa Peningkatan Jalan Karya Tani RT.1 Kel. Sungai Lulut.

Beberapa faktor pendorong yang menjadi keberhasilan sasaran antara lain : Terjalinnnya koordinasi yang baik dengan Lembaga Kemitraan Kecamatan (PKK) dan Pambakal/Lurah, Tersedianya Anggaran yang Cukup dan mudahnya berkoordinasi ke Instansi terkait, Dukungan Partisipasi/peran serta masyarakat

maupun lembaga kemasyarakatan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian sasaran yaitu : Kurangnya Kapasitas SDM untuk Pelaporan semua Kegiatan, jumlah SDM hanya 7 orang di Kelurahan dan Anggaran yang terbatas dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan. Sedangkan

28. Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan

Indikator kinerja adalah Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan dengan target sebesar 100%.

Formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana}}{\text{Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$100\% \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian sasaran kinerja program didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan 2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Adapun faktor penghambat pencapaian sasaran yaitu : Kurangnya Kerjasama intern, Kurang nya SDM serta Fasilitasi tidak di dukung. Sedangkan untuk faktor pendukung diantaranya Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, disupport oleh 2 (dua) sub kegiatan

a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sasaran sub kegiatan adalah Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan Indikator kinerja Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan. Aktivitas pada sub kegiatan ini yaitu berupa fasilitasi kegiatan Pilpres, Pileg dan Pilkada, Pengkoordinasian tahapan Pileg dan Pilpres, Pengamanan kotak suara pileg dan Pilpres sebelum dan setelah pemilu

b. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Pelaksanaan sub kegiatan ini dilaksanakan di Triwulan III berupa Rapat Forum Komunikasi Umat Beragama di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk yang bertujuan untuk memperkuat kerukunan umat beragama, Meningkatkan koordinasi internal organisasi FKUB, Mencegah konflik dan radikalisme beragama, dan Menjaga kerukunan antar umat beragama

29. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakkan
Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi di
kecamatan yang terlaksana}}{\text{Yang bertujuan Jumlah Koordinasi Penerapan
dan Penegakkan Peraturan Daerah yang
terfasilitasi di kecamatan yang direncanakan}} \times 100\%$$
$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Sasaran kinerja program didukung oleh Aktifitas yang dilaksanakan yaitu Pengumpulan data Satlinmas, Rapat Penegakan Perda dan Perkada.

Adapun yang menjadi faktor pendukung nya yaitu : Koordinasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan, Satpol PP, BKAD, TNI/ Kepolisian, dan Pemerintah Desa, Dengan kombinasi faktor-faktor ini, pembinaan Satlinmas dapat terlaksana secara optimal untuk mendukung keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi Pilkada Kabupaten Banjar Tahun 2024, Partisipasi dan Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan peraturan akan dapat memperkuat efektivitas penegakan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu : Kurangnya tenaga pelatih profesional atau materi pelatihan yang relevan serta kurangnya sosialisasi tentang peraturan yang ada.

30.Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja sasaran adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Kinerja sasaran tercapai seluruhnya dari target 100%, dengan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum yang terlaksana}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum yang
direncaakan}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian sasaran kinerja program didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah melalui sub kegiatan :

31. Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Capaian kinerja sub kegiatan yaitu 200 orang. Aktifitas yang dilaksanakan berupa Apel Peringat HUT RI pada 17 Agustus 2024 yang dilaksanakan di Lapangan Pasir Putih Sungai Tabuk Keramat diikuti oleh seluruh aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Desa, dewan guru dan para pelajar, Ibu-ibu PKK dan Instansi vertikal lainnya di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk.

32. Sub kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Target kinerja sub kegiatan yaitu 3 dokumen. Tahapan aktifitas yang sudah dilaksanakan yaitu :

- Pelaksanaan kegiatan safari Ramadhan di Desa Gudang Tengah
- Kegiatan MTQ yang pelaksanaannya di Kecamatan Sungai Tabuk
- Kegiatan PHBI

33. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Target kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yaitu 1 dokumen. Aktivitas yang telah dilaksanakan yaitu Rapat

FORKOPIMCAM. Rakor Forkopimcam bertujuan untuk Meningkatkan sinergi antara lembaga pemerintahan dalam menyelesaikan masalah di tingkat kecamatan, memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan nasional, Menyelesaikan isu-isu strategis seperti keamanan, ketertiban, pelayanan publik, dan pembangunan daerah serta Mendorong pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan efektif melalui musyawarah bersama. Agenda Rakor membahas program kerja, evaluasi pelaksanaan kegiatan, penanganan isu strategis, serta pengambilan keputusan untuk solusi masalah yang muncul di Masyarakat.

Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian sasaran yaitu :Koordinasi yang baik dengan Kapolsek, Danramil, Kepala Puskesmas, Kepala KUA dan pejabat lainnya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu : Susahnya mencari jadwal pelaksanaan karena jadwal yang bentrok.

34. Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan

Indikator kinerja sasaran adalah Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Sasaran tercapai 100,00 persen dengan formulasi perhitungan Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana dibagi Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan dikali 100 persen. Dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana}}{\text{Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian sasaran kinerja program didukung oleh Program Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan 4 (empat) sub kegiatan :

35. Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Capaian kinerja sub kegiatan yaitu 1 dokumen. Tahapan aktifitas yang sudah dilaksanakan yaitu :

- Pengumpulan data/bahan dan persiapan data dukung pelaksanaan fasilitasi Administrasi tata pemerintahan desa
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tata Pemerintahan Desa

36. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Capaian kinerja sub kegiatan yaitu 1 dokumen. Tahapan aktifitas yang sudah dilaksanakan yaitu :

- Pengumpulan data/bahan Pengelolaan Keuangan Desa
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi
- Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa

37. Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Capaian kinerja sub kegiatan yaitu 1 dokumen. Tahapan aktifitas yang sudah dilaksanakan yaitu :

- Pengumpulan data/bahan dan persiapan data dukung pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Dokumentasi/pelaporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembakal Lurah

38. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Capaian kinerja sub kegiatan yaitu 1 dokumen. Tahapan aktifitas yang sudah dilaksanakan yaitu :

- Pengumpulan data/bahan dan persiapan data dukung pelaksanaan fasilitasi
- Rapat Koordinasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Adapun yang menjadi faktor pendukung yaitu : Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat, Koordinasi dan Kerja sama yang baik antara pemerintah desa, kecamatan, dan instansi terkait lainnya, Dukungan Kebijakan: Adanya regulasi dan kebijakan yang jelas dari pemerintah untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu : Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten, lemahnya teknologi dan informasi bagi desa di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk.

A.2 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Sungai Tabuk sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	92.29	121.43	74,81	101,09	73,41	100,56	
2	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	indeks	79.46	104.55	81,24	109,78	67,23	92,10	
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evalausi SKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
9	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
11	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
12	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana	Persen	100	100	100	100	100	100	
13	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
14	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Terlaksananya Kegiatan Trantibumlinmas di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
16	Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	
17	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
18	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Renstra Perubahan Kecamatan Sungai Tabuk 2021-2026

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas tentang Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2021-2026, tahun 2023 dan 2024 Kecamatan Sungai Tabuk menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan. Capaian indikator kinerja sasaran strategis Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan terealisasi pada tahun 2024 sebesar 92,29 Nilai dengan target sebesar 76 Nilai tersebut sudah melebihi target tahun 2024 yang sudah ditentukan dibandingkan dengan tahun 2023 capaian indikator kinerja sasaran strategis Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan terealisasi sebesar 74,81.
2. Capaian kinerja Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian dengan indikator kinerja Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 79,46 indeks dengan target 76 indeks. Nilai tersebut sudah melebihi target tahun 2024 yang sudah ditentukan. Sedangkan tahun 2023 nilai IKKI dengan capaian 81,24 indeks
3. Realisasi capaian kinerja pada Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2023 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
4. Realisasi capaian kinerja Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2024 memperoleh capaian kinerja sebesar 1001% dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian kinerja lebih tinggi sebesar 100%.

5. Realisasi capaian kinerja Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang tersusun tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2023 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
6. Realisasi capaian kinerja Terselenggaranya Kegiatan Kantor dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2023 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
7. Realisasi capaian kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2023 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
8. Realisasi capaian kinerja Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2023 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
9. Realisasi capaian kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase BMD yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 100% dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian kinerja lebih tinggi sebesar 100%.
10. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan tahun 2024 memperoleh capaian

kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2023 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.

11. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 100% dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian kinerja lebih rendah sebesar 100%.
12. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sesuai dengan ketentuan (Kelurahan Sungai Lulut) dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2023 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
13. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2023 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
14. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2023 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
15. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2023 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.

A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA

Indikator kinerja sasaran Tahun 2024 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2024 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2024, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Sungai Tabuk selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dan Target Periode Akhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Periode Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	92,29	81	85
2	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	Indeks	79,46	80	81
3	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evalausi SKPD	Persen	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
4	Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	14	45
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	21	20	46
6	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
7	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	Persen	100	100	100
8	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Persen	100	100	100
9	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	5
10	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	6	13
11	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
12	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	5	24
13	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	4	10	35

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan				
14	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	25	80
15	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	3	11
16	Terselenggaranya kegiatan kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	125	388
17	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	60
18	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah	Persen	100	100	100
19	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100
20	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	Persen	100	100	100
21	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
22	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	5	10
23	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana	Persen	100	100	100
24	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	17
25	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100	100	100
26	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100
27	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas	1	3	9
28	Terlaksananya Kegiatan Trantibumlinmas di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persen	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
29	Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persen	100	100	100
30	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100	100	100
31	Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	200	210	612
32	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen	3	4	16
33	Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
34	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100	100	100
35	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	2
36	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	1	2
37	Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	1	1	2
38	Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan DesaKepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1	1	2

Sumber : Matrik Renstra Perubahan Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2022-2026

Berdasarkan data pada tabel 3.4 tentang Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Periode Akhir di atas menunjukkan bahwa Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Sasaran Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan dengan realisasi sebesar 92,29 Nilai sudah melebihi target tahun 2024 yakni 76 Nilai dan sudah mencapai target akhir periode renstra yakni 85,00 Nilai di tahun 2026.

A.4 REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2024 DAN TARGET NASIONAL

Merupakan capaian kinerja yang membandingkan dengan kinerja yang ditargetkan nasional, untuk mengukur keberhasilan daerah dengan standar Nasional. Tentang Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Tidak bisa di sandingkan dengan Target Provinsi Dan Nasional seperti tabel di atas mengingat belum diperolehnya data yang akurat dan kredible mengenai target Provinsi maupun Nasional tersebut.

A.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA

Pada tahun 2024 berdasarkan Renstra tahun 2021-2026 terjadi perubahan ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator kinerja sasaran Nilai Evaluasi Kecamatan. Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan melalui Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan dengan capaian **berhasil**.

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator kinerja kinerja sasaran Nilai Evaluasi Kecamatan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 92,29 Nilai dengan target 76 Nilai dengan capaian 121.43 % di bandingkan dengan realisasi tahun 2023 kinerja sasaran Evaluasi Kinerja Kecamatan realisasi sebesar 74,81 dengan target 74 dengan capaian 101,09 % maka pada tahun 2024 ini

terdapat kenaikan nilai capaian kinerja dan nilai capaian memenuhi target capaian tahun 2024.

Faktor Kegagalan / Faktor Keberhasilan untuk setiap indikator kinerja yang tercapai (target berhasil terealisasi) pada tahun 2024. Dan Penjelasan faktor penghambat/penyebab kegagalan untuk setiap indikator kinerja yang gagal direalisasi sesuai target pada tahun 2024. Dan alternatif solusi yang telah atau akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut penjelasan mengenai Faktor Kegagalan / Faktor Keberhasilan untuk setiap indikator kinerja yang tercapai.

1. Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di kecamatan dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 121,43 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Data dukung yang disajikan tidak sesuai dengan kriteria tim penilai kabupaten, sehingga Kecamatan Sungai Tabuk pada tahun 2024 berada pada ranking 20 dari 20 Kecamatan
- Kendala kuantitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur berkaitan dengan jumlah dan tingkat keterampilan serta kompetensi dari pegawai atau aparatur yang ada di kecamatan Sungai Tabuk

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Terjalannya kerjasama, koordinasi serta sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah dengan masyarakat dan stakeholder lainnya
- Para Kepala seksi sudah menyiapkan data dukung sesuai aspek yang diminta dalam penilaian EKK tahun 2024

2. Sasaran Strategis/ Sasaran kinerja Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, dengan indikator kinerja Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 104,55 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Tidak adanya inovasi di Kecamatan Sungai Tabuk
- Data dukung yang disajikan tidak sesuai dengan kriteria tim penilai kabupaten, ada beberapa poin dari poin pelayanan publik yang tidak terisi, dan dari poin kepegawaian realisasi diklat tidak sesuai.

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Kerjasama internal dan unit kerja lainnya, teknologi yang semakin maju dan adanya target capaian yang harus dipenuhi
- Data dukung penilaian IKKI diperbaiki dan itu menjadi poin peningkatan nilai dari nilai penjaminan kualitas dari evaluator.

3. Sasaran kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas, dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan Program/ Kegiatan dalam dokumen perencanaan masih belum sepenuhnya selaras

- Terlalu lemahnya informasi dari Bidang pelaksana kegiatan/ lambat apabila diminta data maupun informasi serta sumber daya perencana yang masih terbatas.

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Tersedianya dokumen perencanaan sesuai jadwal
- Koordinasi yang mudah dan nyaman dengan Mitra di Bappeda, BPKPAD, Bagian Organisasi, Inspektorat dan berusaha untuk menyelesaikan laporan sesuai permintaan/sesuai target
- Kerjasama internal dan unit kerja lainnya, teknologi yang semakin maju dan adanya target capaian yang harus dipenuhi

4. Sasaran kinerja Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 13 dokumen

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan Program/ Kegiatan dalam dokumen perencanaan masih belum sepenuhnya selaras
- Terlalu lemahnya informasi dari Bidang pelaksana kegiatan/ lambat apabila diminta data maupun informasi serta sumber daya perencana yang masih terbatas.

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Kerjasama internal dan unit kerja lainnya, teknologi yang semakin maju dan adanya target capaian yang harus dipenuhi
- Tersedianya dokumen perencanaan sesuai jadwal

5. Sasaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 21 laporan

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan Program/ Kegiatan dalam dokumen perencanaan masih belum sepenuhnya selaras
- Terlalu lemahnya informasi dari Bidang pelaksana kegiatan/ lambat apabila diminta data maupun informasi
- Sumber daya perencana yang masih terbatas.

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Kerjasama internal dan unit kerja lainnya, teknologi yang semakin maju dan adanya target capaian yang harus dipenuhi
- Tersedianya dokumen perencanaan sesuai jadwal

6. Sasaran Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas, dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Kurang kompetennya SDM yang ada di bagian keuangan Kecamatan Sungai Tabuk Tersedianya dokumen perencanaan sesuai jadwal
- Sumber daya perencana dan keuangan yang masih terbatas.

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Bimbingan dan koordinasi yang baik dengan BPKPAD

7. Sasaran Pelaksanaan Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas, dengan indikator kinerja Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Masih banyak aset yang tercatat dan tidak diusulkan penghapusan
- di Kecamatan Sungai Tabuk tidak ada yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa
- Masih belum mengimplementasikan penggunaan e katalog sepenuhnya dan merealisasikan secara pengadaan langsung

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Bimbingan dari Bidang Ase tBPKPAD
- Kerjasama tim Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset yang solid

8. Sasaran Lancarnya administrasi kepegawaian daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Terbatasnya sumber daya aparatur pemerintah kecamatan

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Bimbingan dan koordinasi yang baik dengan BKPSDM Kabupaten Banjar

9. Sasaran Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan indikator Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebanyak 1 dokumen

Faktor Penghambat / kegagalan:

Motivasi Kerja Pegawai masih rendah

- Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan
- Bimbingan dan koordinasi yang baik dengan BPKPAD

10. Sasaran Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebanyak 3 orang

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Bimtek tidak tepat sasaran
- Minimnya pendanaan Bimtek

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Adanya Diklat/Bimtek/Pelatihan yang mendorong setiap pegawai untuk berkompetensi

11. Sasaran Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Jumlah Sarana Prasarana Kurang Memadai

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Koordinasi dan Kerja sama yang baik dengan Jajaran samping/Instansi terkait

12. Sasaran Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebanyak 4 paket

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Perlunya kerapian dalam pemasangan kabel kabel listrik agar tidak terlihat semrawut

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Lancarnya pembayaran langganan listrik dan PDAM sesuai dengan kebutuhan pengeluaran per bulan di SKPD

13. Sasaran Tersedianya peralatan rumah tangga dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebanyak 4 paket

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Harga yang dianggarkan di DPA kadang terlalu tinggi dengan harga riil di pasaran

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Disesuaikan dengan anggaran yang tersedia

14. Sasaran Tersedianya Bahan Logistik Kantor dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan yang Disediakan pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebanyak 4 paket.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Harga yang dianggarkan di DPA kadang terlalu tinggi dengan harga riil di pasaran

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Direalisasikan sesuai dengan anggaran kas yang tersedia dan kebutuhan

15. Sasaran Tersedianya Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebanyak 1 paket

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Harga yang dianggarkan di DPA kadang terlalu tinggi dengan harga riil di pasaran

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Direalisasikan sesuai dengan anggaran kas yang tersedia dan kebutuhan

16. Sasaran Tersedianya Terselenggaranya kegiatan kunjungan tamu dengan indikator Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebanyak 12 bulan.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Tidak teranggarkannya Belanja makan minum rapat untuk Sekretariat

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Direalisasikan sesuai dengan anggaran kas yang tersedia dan kebutuhan

17. Sasaran Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebanyak 12 bulan.

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Indikator sub kegiatan pada satuan volume tidak dapat menggambarkan output/ hasil dari kegiatan
- Minimnya pagu perjalanan dinas

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Sesuai dengan undangan yang di prioritaskan

18. Sasaran Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan dengan indikator Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Sarana dan Prasarana Terbatas

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Kemajuan dan keterbukaan teknologi dan informasi public
- Direalisasikan sesuai kebutuhan dan pendanaan yang tersedia

19. Sasaran Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Belum adanya format yang baku tentang SOP atau standar kerja
- Di Kecamatan belum sepenuhnya menerapkan Aplikasi SRIKANDI

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Direalisasikan sesuai dengan anggaran kas yang tersedia dan kebutuhan
- Upaya memenuhi penyusunan Probis di Kecamatan Sungai Tabuk

20. Sasaran Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan dengan indikator Persentase Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Kurangnya sarana dan prasarana untuk Kepala Seksi di Kecamatan
- Minimnya Pendanaan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Direalisasikan sesuai dengan anggaran kas yang tersedia dan kebutuhan

21. Sasaran Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hadir ke Posyandu serta rendahnya kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Stunting pada anak.

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Koordinasi yang baik dengan Masyarakat, Pembakal dan Kelurahan serta internal Kecamatan dan Dinas SKPD terkait

22. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Rendahnya Pemahaman masyarakat tentang masalah sosial, terutama kurangnya kesadaran masyarakat tentang kriteria penerima bantuan sosial

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Koordinasi yang baik antara Pemerintahan Desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, serta Dukungan dari Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan Kesejahteraan Sosial

23. Sasaran Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat dengan indikator Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Rendahnya Pemahaman masyarakat tentang masalah sosial, terutama kurangnya kesa daran masyarakat tentang kriteria penerima bantuan sosial
- Keterbatasan SDM pada Kasi Kessos

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Koordinasi yang baik antara Pemerintahan Desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, serta Dukungan dari Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan Kesejahteraan Sosial

24. Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 1 laporan

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Rendahnya Pemahaman masyarakat tentang masalah sosial, terutama kurangnya kesadaran masyarakat tentang kriteria penerima bantuan sosial, Belum pernah dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah berhasil menyelenggarakan pelimpahan wewenang

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Koordinasi yang baik antara Pemerintahan Desa/kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, serta Dukungan dari Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan Kesejahteraan Sosial

25. Sasaran Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa dengan indikator Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebanyak 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang masih kurang
- Acara Kegiatan di Desa sering berbenturan jadwal dengan kegiatan yang ada diKecamatan
- Kegiatan PKK menyita waktu PTT Kecamatan karena kurangnya kader di Kecamatan.

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Koordinasi dan Kerja sama yang baik dengan Jajaran samping/Instansi terkait, Motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab

26. Sasaran Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan indikator Presentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Kurangnya Kapasitas SDM untuk Pelaporan semua Kegiatan
- Jumlah SDM hanya 7 orang di Kelurahan dan Anggaran yang terbatas dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Terjalannya koordinasi yang baik dengan Lembaga Kemitraan Kecamatan (PKK) dan Pambakal/Lurah
- Tersedianya Anggaran yang Cukup dan mudahnya berkoordinasi ke Instansi terkait
- Dukungan Partisipasi/peran serta masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan

27. Sasaran Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan indikator Presentase Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Kurangnya Kapasitas SDM untuk Pelaporan semua Kegiatan
- Jumlah SDM hanya 7 orang di Kelurahan dan Anggaran yang terbatas dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Dukungan Partisipasi/peran serta masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan

28. Sasaran Terlaksananya Kegiatan Trantibumlinmas di Kecamatan dengan indikator Presentase Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Kurangnya Kerjasama intern
- Kurang nya SDM serta Fasilitas tidak di dukung

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat

29. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dengan indikator Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Kurangnya tenaga pelatih profesional atau materi pelatihan yang relevan serta kurangnya sosialisasi tentang peraturan yang ada

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Koordinasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan, Satpol PP, BKAD, TNI/ Kepolisian, dan Pemerintah Desa, Dengan kombinasi faktor-faktor ini, pembinaan Satlinmas dapat terlaksana secara optimal untuk mendukung keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi Pilkada Kabupaten Banjar Tahun 2024

- Partisipasi dan Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan peraturan akan dapat memperkuat efektivitas penegakan

30. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Susahnya mencari jadwal pelaksanaan karena jadwal yang bentrok

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Koordinasi yang baik dengan Kapolsek, Danramil, Kepala Puskesmas, Kepala KUA dan pejabat lainnya

31. Sasaran Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebanyak 200 Orang

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten

- lemahnya teknologi dan informasi bagi desa di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat, Koordinasi dan Kerja sama yang baik antara pemerintah desa, kecamatan, dan instansi terkait lainnya

32. Sasaran Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal dengan indikator Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebanyak 3 laporan

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Kurangnya koordinasi dan Kerjasama yang baik
- Kualitas dan kuantitas Sumber Daya aparatur yang perlu peningkatan khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan public
- Susahnya mencari jadwal pemangku jabatan karena sering berbenturan dengan kegiatan di lain

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Terlaksananya MTQ di Kecamatan Sungai Tabuk

33. Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan indikator Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebanyak 1 dokumen

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Susahnya mencari jadwal pemangku jabatan karena sering berbenturan dengan kegiatan di lain

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Adanya SE tentang pembayaran Honor Forkompimcam
- Koordinasi dan Kerja sama yang baik dengan Jajaran samping/Instansi terkait

34. Sasaran Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan dengan indikator Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebesar 100 %

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Sumber daya di Seksi Pemerintahan pengelola merangkap / masih terbatas.

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Adanya pembinaan dan pengawasan terkait dengan pengelolaan dana desa yang ada oleh pemerintah
- Dukungan Partisipasi/peran serta masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan

35. Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan indikator Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebanyak 1 dokumen

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi desa masih kurang
- Kemampuan aparatur desa masih terbatas
- Tanggung jawab aparatur desa kurang

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Adanya evaluasi dalam persoalan penyelenggaraan pemerintah desa
- Adanya regulasi dari Pemerintah

36. Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan indikator Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebanyak 1 dokumen

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi desa masih kurang
- Kemampuan aparatur desa masih terbatas

Tanggung jawab aparatur desa kurang

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Adanya evaluasi dalam persoalan penyelenggaraan pemerintah desa
- Adanya regulasi dari Pemerintah

37. Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dengan indikator Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebanyak 1 dokumen

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi desa masih kurang
- Kurangnya keanggotaan yang mengisi Tata Pemerintahan Desa

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait.
- Adanya kemampuan dalam diri aparatur untuk dapat menyelesaikan pekerjaan

38. Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kepala Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa pada tahun 2024 telah tercapai dengan capaian realisasi sebanyak 1 dokumen

Faktor Penghambat / kegagalan:

- Kurangnya keanggotaan yang mengisi Badan Permusyawaratan Desa

Faktor Pendorong/ Faktor keberhasilan

- Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan perangkat daerah lainnya yang terkait

Alternatif Dan Solusi Yang Akan Dilaksanakan Untuk Mengatasi Permasalahan Tersebut Diatas .

1. Agar melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dari level eselon III sampai dengan pelaksana/ staf dan di lengkapi dengan proses, analisis dan penjelasan secara singkat mengenai pencapaian kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja
2. Agar meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi bulanan/ triwulanan/ tahunan dengan melibatkan pimpinan, dan di ikuti oleh seluruh penanggung jawab kinerja, serta mengevaluasi, menganalisis, dan dapat memberikan dampak perbaikan dalam pencapaian kinerja pada bulan/ triwulanan/ tahunan berikutnya
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kinerja ASN. Monitoring dan evaluasi bulanan juga diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan yang selama ini dilaksanakan di kecamatan agar sinkron antara perencanaan dan target serta ada kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penambahan sumber daya manusia dan peningkatan wawasan
5. Memaksimalkan koordinasi pada intern Kecamatan Sungai Tabuk, sehingga Capaian Kinerja Sasaran Renstra, Program dan Kegiatan bisa dicapai dengan lebih baik lagi

A.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang pencapaian kinerjanya mencapai 100%. Dari 16 (Enam belas) sasaran strategis/program/kegiatan dengan indikator kinerja mayoritas menunjukkan pencapaian yang sama dengan 100% tetapi dengan realisasi anggaran kurang dari 100%,

Banyaknya kegiatan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.5 Efisien Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
A	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	121,43	93,07	28,36
I	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	104,55	93,45	11,10
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evalausi SKPD	100	100	0,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	93,34	6,66
3	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100	100	0,00
4	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	100	99,87	0,13
5	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	93,52	6,48

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
6	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah	100	97,34	2,66
7	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	87,22	12,78
8	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	100	95,15	4,85
9	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	54,75	45,25
10	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana	100	80,00	20,00
11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	69,09	30,91
12	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	88,76	11,24
13	Terlaksananya Kegiatan Trantibumlinmas di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	72,55	27,45
14	Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	92,73	7,27
15	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	96,77	3,23
16	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	99,99	0,01

Sumber : Pengelohan Data Kecamatan Sungai Tabuk

A.7 ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan serta pencapaian pernyataan kinerja adalah :

1. Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang merupakan Sasaran Utama Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi dengan target 76 Nilai dapat terealisasi 92,29 Nilai dengan nilai capaian 121,43% yang didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp 6.057.917.961,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.637.912.949,- atau (93,07 %) dengan realisasi capaian fisik 99.53 %.

Faktor penyebab keberhasilan tercapainya sasaran Strategis sasaran kinerja Renstra kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024 adalah :

1. Faktor Internal
 - Dukungan semua pihak baik dari level eselon sampai staf yang sama- sama berkomitmen dalam meningkatkan capaian Renstra Kecamatan Sungai Tabuk tahun 2024
 - Pemenuhan data dukung dan pencapaian kinerja baik serta realisasi anggaran program/ kegiatan sesuai dengan kewenangan. Dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Tabuk tahun 2024
2. Faktor eksternal
 - Peran dari Masyarakat/ desa yang berperan dan membantu dalam memberikan informasi dan data dukung yang diperlukan saat Kecamatan Sungai Tabuk melakukan pengumpulan data dukung yang diminta oleh tim penilai kabupaten dalam hal ini tim dari Bidang Pemerintahan Setda Banjar. Hal ini menjadikan pelaksanaan penilaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan

2. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian dengan Indikator Kinerja Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI) target 76 indeks realisasi 79,46 dengan nilai capaian 104,55%, Indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.694.638.971,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.452.612.256,- dan Persentase capaian 93,45 %.

Faktor penyebab keberhasilan tercapainya sasaran Strategis sasaran kinerja Renstra kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024 adalah :

Faktor Internal

- Pemenuhan data dukung yang sesuai yang diminta oleh tim penilai IKKI saat Penilaian Mandiri IKKI, dan pemenuhan data dukung yang sesuai yang diminta oleh tim penilai IKKI saat Penjaminan Kualitas .
 - Data dukung yang sesuai yang diminta oleh tim adalah data dukung yang dinilai oleh karena itu dukungan dari pemangku kegiatan yang ada disekretariat Kecamatan Sungai Tabuk sangat dibutuhkan karena ada data dukung yang perbaiki sesuai permintaan tim penilai. Data dukung yang diminta adalah data dukung yang berpedoman pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Tabuk tahun 2024
3. Sasaran Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dengan Indikator Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, Indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.160.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.160.000,- dan Persentase capaian sebesar 100%.
 4. Sasaran Kinerja Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, indikator ini didukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.756.186.741,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.609.929.373,- dengan Persentase capaian anggaran 93,34%.

5. Sasaran Kinerja Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang tersusun memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 12.350.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.350.000,- dengan Persentase capaian anggaran 100%.
6. Sasaran Kinerja Lancarnya administrasi kepegawaian daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 31.500.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 31.459.850,- dengan Persentase capaian anggaran 99,87%.
7. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Kegiatan Kantor dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 190.793.712 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 178.431.960,- dengan Persentase capaian anggaran 93,52%.
8. Sasaran Kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 334.872.400,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 325.961.400,- dengan Persentase capaian anggaran 97,34%.
9. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 240.019.008,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 209.336.998,- dengan Persentase capaian anggaran 87,22%.
10. Sasaran Kinerja Terpeliharanya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai dengan rencana kebutuhan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 77.757.110,- dan realisasi penyerapan

anggaran sebesar Rp. 73.982.675,- dengan Persentase capaian anggaran 95,15%.

11. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan dengan indikator Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana memperoleh capaian kinerja sebesar 80.00% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 22.550.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 14.240.000,- dengan Persentase capaian anggaran 63,15%.
12. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 65.405.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 45.189.200,- dengan Persentase capaian anggaran 69,09%.
13. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sesuai dengan ketentuan (Kelurahan Sungai Lutut) dengan indikator Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 857.542.200,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 761.168.993,- dengan Persentase capaian anggaran 88,76%.
14. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 32.681.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 23.710.000,- dengan Persentase capaian anggaran 72,55%.
15. Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.358.595.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.314.688.500,- dengan Persentase capaian anggaran 96,77%.

16. Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan indikator Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan memperoleh capaian kinerja sebesar 100% didukung dengan anggaran sebesar Rp.23.755.790,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.23.754.000,- dengan Persentase capaian anggaran 99,99%.

A.8 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024 memperoleh nilai 71,16 atau predikat "BB". Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen yang di evaluasi. maka pada tahun 2024 direkomendasikan kepada Camat Sungai Tabuk hal-hal sebagai berikut :

1. Menyajikan sasaran Strategis Camat, dan sasaran kinerja semua level pada dokumen Renja;
2. Menyelaraskan Dokumen Rencana Aksi dengan SK IKU dan PK pada kategori pengampu/ penanggungjawab;
3. Untuk mempublikasikan semua dokumen perencanaan tepat waktu, serta SK IKU yang memuat secara lengkap Definisi Operasional dan formulasi perhitungan ke ESR MenPAN RB;
4. Menyelaraskan SK IKU dnegan Perjanjian Kinerja sampai dengan level staf/ pelaksana (pengampu sasaran kinerja sama dengan atasannya);
5. Menggambarkan crosscutting anatar SKPD pada Pohon Kinerja;
6. Menyajikan sasaran kinerja yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dalam Laporan Kinerja Triwulan I (pertama) dan memuat Perjanjian Kinerja secara lengkap;

7. Menjelaskan kinerja SKPD pada analisis capaian kinerja bukan hanya menjelaskan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan;
8. Menyajikan dokumen laporan capaian kinerja triwulanan dari aplikasi Simondalev;
9. Membuat laporan capaian kinerja triwulan I sampai pada level staf/ pelaksana tidak hanya sampai eselon IV;
10. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
11. Menyempurnakan laporan monitoring evaluasi dengan menambahkan rekomendasi dan tindaklanjutnya;
12. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024;

Tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Kecamatan Sungai Tabuk telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Renja Perubahan 2024 telah dikerjakan dan Rancangan Akhir Renja 2025 sudah selesai dikerjakan
2. Perjanjian Kinerja (PK) sampai dengan individu/staf yang sudah di buat.
3. Mempublikasikan LHE dan TLHE di ESR MenPAN RB
4. Memperbaiki SK IKU yang memuat Definisi Operasional
5. Telah melakukan perbaikan Laporan Kinerja di Triwulan III yang memuat sasaran kinerja
6. Telah melakukan perbaikan Laporan Kinerja sampai level staf/ pelaksana
7. Menelaah hasil pencapaian dengan mengadakan rapat Monev/ Evaluasi yang dipimpin oleh Camat
8. Menyajikan Notulen hasil Rapat yang memuat rekomendasi perbaikan.

A. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Sungai Tabuk tahun 2024 adalah sebesar **Rp 6.057.917.961,-** dengan realisasi anggaran **Rp. 5.637.912.949,- atau (93,07 %)** dengan rincian untuk Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 2.812.186.741,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.625.929.373,- atau (93,38 %), Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran Rp 2.767.047.410,- dan Realisasi sebesar Rp. 2.539.648.766,- atau (91,78 %) serta Belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. 478.683.810,- dengan realisasi sebesar Rp. 472.334.810,- atau (98,67 %).

Tabel 3.6 Realiasi Jenis Belanja

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Belanja Operasi	5.579.234.151	5.165.578.139	92,59
	a. Belanja Pegawai	2.812.186.741	2.625.929.373	93,38
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.767.047.410	2.539.648.766	91,78
	c. Belanja Hibah	-	-	N/A
2	Belanja Modal	478.683.810	472.334.810	98,67
TOTAL		6.057.917.961	5.637.912.949	93,07

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024

Adapun untuk realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut

Tabel 3.7 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase capaian
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	6.057.917.961	5.637.912.949	93,07
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.694.638.971	3.452.612.256	93,45
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.160.000	11.160.000	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.910.000	4.910.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.250.000	6.250.000	100,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase capaian
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.796.186.741	2.609.929.373	93,34
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.756.746.741	2.570.489.373	93,24
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.640.000	38.640.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	800.000	800.000	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.350.000	12.350.000	100,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	350.000	350.000	100,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.000.000	12.000.000	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.500.000	31.459.850	99,87
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.500.000	1.460.000	97,33
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	29.999.850	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.793.712	178.431.960	93,52
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.789.000	3.143.000	82,95
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.495.212	19.470.000	99,87
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.909.500	17.645.000	93,31
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.600.000	3.600.000	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	5.000.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000	129.573.960	92,55
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	334.872.400	325.961.400	97,34
Pengadaan Mebel	12.000.000	12.000.000	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	322.872.400	313.961.400	97,24
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.019.008	209.336.998	87,22
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.179.008	25.351.998	53,74
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.840.000	180.985.000	95,34
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.757.110	73.982.675	95,15
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.780.000	55.255.565	99,06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.980.000	8.730.000	72,87

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase capaian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	9.997.110	9.997.110	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	22.550.000	14.240.000	63,15
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	15.050.000	8.240.000	54,75
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.050.000	8.240.000	54,75
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.500.000	6.000.000	80,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.500.000	6.000.000	80,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	922.947.200	806.358.193	87,37
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65.405.000	45.189.200	69,09
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000	15.000.000	100,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.405.000	30.189.200	59,89
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	857.542.200	761.168.993	88,76
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Lutut	857.542.200	761.168.993	88,76
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.431.000	26.260.000	74,12
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.681.000	23.710.000	100,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.681.000	21.710.000	70,76
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.000.000	2.000.000	100,00
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.750.000	2.550.000	92,73
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.750.000	2.550.000	92,73
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.358.595.000	1.314.688.500	96,77

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase capaian
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.358.595.000	1.314.688.500	96,77
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	49.995.000	40.245.000	80,50
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1.275.000.000	1.252.993.500	98,27
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.600.000	21.450.000	63,84
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.755.790	23.754.000	99,99
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.755.790	23.754.000	99,99
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000	3.000.000	100,00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000	3.000.000	100,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.755.790	14.754.000	99,99
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.000.000	3.000.000	100,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Aplikasi SIPD Langkar Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024

Penjelasan Tabel 3.7 sebagai berikut :

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang merupakan Sasaran Utama Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi dengan target 76 dapat terealisasi 92,29 dengan nilai capaian 121,43 % yang didukung dengan target anggaran sebesar Rp 6.057.917.961,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.637.912.949,- atau (93,07 %) dengan realisasi fisik sebesar 99,53 %.

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan diukur dengan indikator Indeks kepatuhan dan Kinerja Intern sebesar 76,00%. Adapun realisasi program ini adalah dengan tercapainya Indeks kepatuhan dan Kinerja Intern

sebesar 79,% dengan pagu sebesar Rp. 30.208.247.741,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.668.003.974,-.atau (94.90%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indicator Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evalausi SKPD. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi tersusunnya jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi SKPD sbesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 11.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.160.000,- atau (100 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini disukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah diukur dengan indicator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan target kinerja berupa 13 Dokumen. Adapun realisasi kegiatan yaitu tersusunnya Dokumen RENSTRA Perubahan Kedua, Rencana Aksi, Tabel Keselarasan, Rencana Aksi Perubahan, Tabek Keselarasan Perubahan, RKA Murni, RKA Perubahan, DPA Murni, DPA Perubahan, LKJIP, PK Murni, PK Perubahan, IKU. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.910.000,- dnegan realisasi Rp. 4.910.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indicator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan target kinerja berupa 21 Laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan, Laporan RFK, Laporan RENJA, e-monev SAKIP Triwulan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.250.000,- dnegan realisasi Rp. 6.250.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

2). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah diukur dengan indikator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 2.796.186.741,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.609.929.373,- atau (93,34 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan diukur dengan indikator Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 273 Orang/bulan. Adapun realisasi kegiatan yaitu Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 273 Orang selama 1 tahun. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.796.186.741,- dengan realisasi Rp. 2.570.489.373,- atau (93,24 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD diukur dengan indikator Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 4 dokumen. Adapun realisasi kegiatan yaitu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 4 dokumen penatausahaan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 38.640.000,- dengan realisasi Rp. 38.640.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD diukur dengan indikator Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 Laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun/ Laporan CaLK Tahun 2024 sebanyak 1 Laporan Keuangan SKPD. Pagu sub

kegiatan ini sebesar Rp. 800.000,- dengan realisasi Rp. 800.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

3). Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah diukur dengan indikator Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi Jumlah Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 12.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.350.000,- atau (100 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD diukur dengan indikator Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 1 Laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu Terlaksananya rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah sebanyak 1 Laporan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 350.000,- dengan realisasi Rp. 350.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD diukur dengan indikator Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 1 Laporan/ Honorarium Bendahara Barang dan Pembantu Barang. Adapun realisasi kegiatan yaitu Terlaksananya penatausahaan BMD sebanyak 1 Laporan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 12.000.000,- dengan realisasi Rp. 12.000.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

4). Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah diukur dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan jumlah Administrasi Kepegawaian di Kecamatan sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 31500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.459.850,- atau (99,87 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebanyak 1 Laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu tersedianya laporan monitoring, evaluasi dan kinerja pegawai (SKP) sebanyak 1 Laporan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.500.000,- dengan realisasi Rp. 1.460.000,- atau (97,33 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 3. Ada orang. Adapun realisasi kegiatan yaitu Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 3 orang yang mengikuti bimtek. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi Rp. 29.999.850,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

5). Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah diukur dengan indikator Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 190.793.712,- dengan realisasi

sebesar Rp. 178.431.960,- atau (93,52 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor diukur dengan indicator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 4 paket. Adapun realisasi kegiatan yaitu tersedianya komponen Listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 4 paket. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.789.000,- dengan realisasi Rp. 3.143.000,- atau (82,95 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga diukur dengan indicator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 4 paket. Adapun realisasi kegiatan yaitu tersedianya peralatan rumah tangga seperti sendok, piring dan gelas untuk kegiatan Safari Ramadhan, pergantian tirai/ horden kantor sebanyak 4 paket. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 19.495.212,- dengan realisasi Rp. 19.470.000,- atau (99,87 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor diukur dengan indicator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan sebanyak 4 paket. Adapun realisasi kegiatan yaitu jumlah bahan logistic yang tersedia di kecamatan sebanyak 4 paket. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 18.909.500,- dengan realisasi Rp. 17.645.000,- atau (93,31 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan diukur dengan indicator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket. Adapun realisasi kegiatan yaitu Jumlah barang cetak dan pengadaan yang tersedia di kecamatan sebanyak 1 paket. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.600.000,- dengan realisasi

Rp. 3.600.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu diukur dengan indicator Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 1 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu Jumlah tamu yang terfasilitasi di kecamatan sebanyak 1 laporan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi Rp. 5.000.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD diukur dengan indicator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana sebanyak 12 laporan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 140.000.000,- dengan realisasi Rp. 129.573.960,- atau (92,55 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

6). Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur dengan indicator Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah yang terlaksana sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 334.872.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 325.961.400,- atau (97,34 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel diukur dengan indicator Jumlah Paket mebel yang Disediakan sebanyak 2 unit. Adapun realisasi kegiatan yaitu tersedianya mebel sebanyak 2 unit. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp.

12.000.000,- dengan realisasi Rp. 12.000.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

- b. Sub Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya diukur dengan indicator Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan sebanyak 287 unit. Adapun realisasi kegiatan yaitu tersedianya PC, Laptop, Printer, Kamera, Kursi plastik Nappolly, Sound System, Microphone. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 322.872.400,- dengan realisasi Rp. 313.961.400,- atau (97,24 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

7). Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diukur dengan indicator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 240.019.008,- dengan realisasi sebesar Rp. 209.336.998,- atau (87,22 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat diukur dengan indicator Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 4 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan surat menyurat di kecamatan sebanyak 4 laporan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.000.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik diukur dengan indicator Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang tersedia sebanyak 12 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik sebanyak 12 laporan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 47.179.008,- dengan realisasi Rp. 25.351.998,- atau (53,74 %) dengan

capaian realisasi fisik sebesar 100 %. Tidak banyak terserap karena sesuai dengan kebutuhan rutin pengeluaran bulanan di kecamatan

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor diukur dengan indicator Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terealisasinya pembayaran upah PTT dan Iuran jaminan Kesehatan dan jaminan kecelakaan sebanyak 12 laporan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 189.840.000,- dengan realisasi Rp. 180.985.000,- atau (95,34 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

8). Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diukur dengan indicator Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang terpelihara sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 77.757.110,- dengan realisasi sebesar Rp. 73.982.675,- atau (95,15 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan diukur dengan indicator Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya sebanyak 4 unit. Adapun realisasi kegiatan yaitu terpeliharanya mobil dinas operasional Camat dan kendaraan roda 2 di kecamatan sebanyak 4 unit. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 55.780.000,- dengan realisasi Rp. 55.255.565,- atau (99,06 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya diukur dengan indicator Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak

18 unit. Adapun realisasi kegiatan yaitu terpeliharanya peralatan dan mesin seperti AC, PC, Laptop, printer yang di service sebanyak 18 unit. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.980.000,- dengan realisasi Rp. 8.730.000,- atau (77,87 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya diukur dengan indikator Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 unit. Adapun realisasi kegiatan yaitu terpeliharanya bangunan Gedung kantor kecamatan seperti perbaikan atap dan pergantian keramik sebanyak 1 unit. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 9.997.110,- dengan realisasi Rp. 9.997.110,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

PUBLIK

Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik diukur dengan indikator Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana sebesar 100%. Adapun realisasi program ini adalah dengan tercapainya Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana sebesar 100% dengan pagu sebesar Rp. 22.550.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.240.000,-.atau (63,15%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di

Kecamatan diukur dengan indicator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 15.050.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.240.000,- atau (54,75 %) dan realisasi fisik sebesar 80.00 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan diukur dengan indicator Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan berupa 5 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Rakor Pra rembuk stunting, Rakor rembuk stunting, Rakor Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Rapat Koordinasi Puskessos. Sedangkan untuk kegiatan Rapat Koordinasi PKH tidak dapat direalisasikan karena waktu verifikasi data yang tidak mencukupi untuk diadakan kegiatan tersebut. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.050.000,- dengan realisasi Rp. 8.240.000,- atau (54,75 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 80.00 %.

2). Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Capaian kinerja Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat diukur dengan indicator Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi Jumlah Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 7.500.000,- dengan realisasi

sebesar Rp. 6.000.000,- atau (80,00 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan diukur dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan berupa 1 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Rapat TKPK. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.500.000,- dengan realisasi Rp. 6.000.000,- atau (80,00 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Capaian kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diukur dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sebesar 100%. Adapun realisasi program ini adalah dengan tercapainya Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sebesar 100% dengan pagu sebesar Rp. 922.947.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 806.358.193,- atau (87,37%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1). Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa diukur dengan indikator Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan (Kegiatan PKK, Musrenbang Kecamatan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 665.405.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.189.200,- atau (69,09 %) dan realisasi fisik sebesar 90,00 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa diukur dengan indicator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebanyak 21 Lembaga Kemasyarakatan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan pada Bulan Januari 2024. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi Rp. 15.000.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan diukur dengan indicator Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebanyak 3 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Evaluasi Anggaran Dana Desa, Monitoring Dokumen Keuangan Desa, Kegiatan PKK, Pembinaan Pengelolaan ADD, Rapat Evaluasi APBDES dan Sosialisasi BUMDES. Yang tidak terealisasi yaitu Jamuan Tamu pada kegiatan PKK. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 50.405.000,- dengan realisasi Rp. 30.189.200,- atau (59,89 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 90,00 %.

2). Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Capaian kinerja Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan diukur dengan indicator Presentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 857.542.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 761.168.993,- atau (88,76 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Lutut diukur dengan indicator Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebanyak 1 Pokmas. Adapun

realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Pelatihan Administrasi PKK, Pelatihan Kegiatan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terlaksananya Sosialisasi Stunting, Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Belanja Modal Jalan Lainnya berupa Jalan Pemukiman di jalan Karya Tani RT. 1 Kelurahan Sungai Lulut serta untuk Operasional Kelurahan Sungai Lulut Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 857.542.200,- dengan realisasi Rp. 761.168.993,- atau (88,76 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

IV. PROGRAM PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Capaian kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum diukur dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan sebesar 100%. Adapun realisasi program ini adalah dengan tercapainya Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan sebesar 100% dengan pagu sebesar Rp. 35.431.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.260.000,-.atau (74,12%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1). Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diukur dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi Terlaksananya Kegiatan Trantibumlinmas di Kecamatan sebesar 100 %. Pagu kegiatan

ini sebesar Rp. 32.681.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.710.000,- atau (75,55 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan diukur dengan indikator Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan sebanyak 1 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Fasilitas Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjar berupa Apel Gabungan dan Pengamanan pelaksanaan. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 30.681.000,- dengan realisasi Rp. 21.710.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat diukur dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebanyak 1 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk . Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.000.000,- dengan realisasi Rp. 2.000.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

2). Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 2,750.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.550.000,- atau

(92,73 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia diukur dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 1 laporan. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Rapat Penegakan Perda dan Perkada. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.750.000,- dengan realisasi Rp. 2.550.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Umum diukur dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 100%. Adapun realisasi program ini adalah dengan Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan sebesar 100% dengan pagu sebesar Rp. 1.358.595.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.314.688.500,-.atau (96,77%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah diukur dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan

sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 49.995.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.245.000,- atau (96,77 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diukur dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebanyak 200 orang. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Rapat persiapan kegiatan Peringatan HUT RI, Peringatan HUT RI pada Bulan Agustus 2024. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 49.995.000,- dengan realisasi Rp. 40.245.000,- atau (80,50 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Sub kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal sebanyak 3 dokumen. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan MTQ pada bulan Juli 2024 dan Kegiatan PHBI. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.275.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.252.993.500,- atau (98,27 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- c. Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebanyak 1 dokumen. Adapun

realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Pertemuan FORKOPIMCAM sebanyak 3 kali dan Honorarium Tim Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Pertemuan Forkopimcam tidak terlaksana karena susah mencari jadwal agenda yang saling berbenturan dengan kegiatan lain dengan pertemuan Tim Forkopimcam. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 33.600.000,- dengan realisasi Rp. 21.450.000,- atau (63,84 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN

DESA

Capaian kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa diukur dengan indikator Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar 100%. Adapun realisasi program ini adalah dengan Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar 100% dengan pagu sebesar Rp. 23.755.790,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.754.000,- atau (99,99%) dengan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1). Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Capaian kinerja Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa diukur dengan indikator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun target kegiatan ini adalah 100 % dengan realisasi Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan sebesar 100 %. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 23.755.790,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.754.000,- atau (99,99 %) dan realisasi fisik sebesar 100 %, Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Rapat Pembinaan Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.000.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- b. Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Rapat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.000.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- c. Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Rapat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 14.755.790,- dengan realisasi Rp. 14.754.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.
- d. Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 1 dokumen. Adapun realisasi kegiatan yaitu terlaksananya Rapat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Pagu sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.000.000,- atau (100 %) dengan capaian realisasi fisik sebesar 100 %.

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran untuk mewujudkan Sasaran Kinerja Organisasi

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76	92.29	121.43	6.057.917.961	5.637.912.949	93,07
I	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Sungai Tabuk	76	79.46	104.55	3.694.638.971	3.452.612.256	93,45
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evalausi SKPD	100	100	100	11.160.000	11.160.000	100,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	2.796.186.741	2.609.929.373	93,34
3	Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100	100	100	12.350.000	12.350.000	100,00
4	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	100	100	100	31.500.000	31.459.850	99,87
5	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	190.793.712	178.431.960	93,52
6	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan daerah	100	100	100	334.872.400	325.961.400	97,34
7	Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	240.019.008	209.336.998	87,22
8	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat daerah	100	100	100	77.757.110	73.982.675	95,15
9	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	80,00	100	15.050.000	8.240.000	54,75
10	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana	100	100	100	7.500.000	6.000.000	80,00
11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	92,50	100	65.405.000	45.189.200	69,09

No	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	98,00	100	857.542.200	761.168.993	88,76
13	Terlaksananya Kegiatan Trantibumlinmas di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	100	100	32.681.000	23.710.000	72,55
14	Meningkatnya Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	100	100	2.750.000	2.550.000	92,73
15	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	98,00	100	1.358.595.000	1.314.688.500	96,77
16	Meningkatnya fasilitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	100	23.755.790	23.754.000	99,99

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024, merupakan bentuk pengawasan dan pertanggung jawaban pencapaian kinerja Tahun 2024, yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKJIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2024 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan Kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024, sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan dengan target Tahun 2024 sebesar 76 Nilai dengan realisasi sebesar 92,29 Nilai dan perolehan capaian sebesar 121,43%, dengan predikat Berhasil. Pencapaian keberhasilan sasaran strategis ini di dukung indikator kinerja lain sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.
2. Sasaran Kinerja Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian
3. Sasaran Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas
4. Sasaran Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas
5. Sasaran Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas
6. Sasaran Kinerja Pelaksanaan Penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berkualitas
7. Sasaran Kinerja Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang berkualitas
8. Sasaran Kinerja Lancarnya administrasi kepegawaian daerah

9. Sasaran Kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor
10. Sasaran Kinerja Tersedianya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan
11. Sasaran Kinerja Terselenggaranya jasa penunjang pelayanan umum kantor
12. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan
13. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
14. Sasaran Kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
15. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
16. Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
17. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
18. Sasaran Kinerja Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
19. Sasaran Kinerja Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan
20. Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa
21. Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
22. Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa
23. Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kepala Desa

Tercapainya target kinerja untuk masing- masing indikator kinerja yang termuat Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menjadi salah satu faktor pendorong tercapainya target indikator sasaran strategis Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024.

Saran-saran

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Pembahasan di tingkat yang lebih tinggi tentang program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Tabuk agar sinkron antara perencanaan dan keuangan agar adanya kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
2. Perlunya peningkatan wawasan dan pendampingan yang rutin oleh instansi /mitra pemangku terhadap aparatur kecamatan khususnya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja , Tabel Keselaran guna peningkatan nilai SAKIP.
3. Pelaksanaan Koordinasi yang lebih intens lagi baik itu pada internal kecamatan Sungai Tabuk maupun dengan pihak diluar Kecamatan Sungai Tabuk

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sungai Tabuk ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Sungai Tabuk berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2024 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Pencapaian target- target perencanaan pada tahun berikutnya.



Sungai Tabuk, Januari 2025
Camat Sungai Tabuk,

H. TAUFIQURRAHMAN, SH, M.Si
NIP. 196708131994041001

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja dan Cascading
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Sungai Tabuk Tahun 2024

